

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus atau perkara pidana merupakan perkara publik, yang proses pengaturannya adalah diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik. Dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya. Kasus pidana melibatkan orang atau subyek hukum yang melawan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana.

Ramdlon Naning, menyatakan bahwa :¹

“Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan hasil karya pertama bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam aturan No. 8 tahun 1981 yang mengatur proses beracara tersebut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat.”

Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau

¹ Ramdlon Naning, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 28.

suatu badan hukum. Di dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa :

“Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”²

Di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa :

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.”

Yahya Harahap menyatakan bahwa :³

“Hampir tidak ada literatur yang dapat dipakai sebagai acuan tentang pengertian surat dakwaan. Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”

Menurut Rusli Muhammad, KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti

² Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm 414.

disebutkan Pasal 143 ayat (2), menyatakan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :⁴

- (1) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; dan
- (2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Osman Simanjuntak mengatakan :⁵

“Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materiil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concursum realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.”

Bila ditelusuri KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditemui satu ketentuan yang mengatur bagaimana sebuah surat dakwaan disusun, termasuk bentuknya. Dalam kaitan ini KUHAP berdasarkan Pasal 14 huruf (d) hanya menyebutkan bahwa yang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum.

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2007, hlm. 83.

⁵ Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Cetakan. Pertama*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999, hlm. 72.

Artinya, bagaimana bentuk dan susunan surat dakwaan KUHAP tidak menentukannya.

Ada banyak faktor yang memungkinkan surat dakwaan bentuk dan susunan surat dakwaan beragam. Bisa karena faktor suatu perbuatan menyentuh beberapa tindak pidana atau ada keraguan dari penuntut umum menentukan pasal pidana yang mana yang dikenakan yang paling tepat, dan alasan lainnya. Dalam praktik peradilan dijumpai bentuk dan susunan surat dakwaan yang masing-masing bentuk dan jenis surat dakwaan itu memiliki pertimbangan teknis sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan disebutkan beberapa bentuk dan susunan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :⁶

1. Dakwaan Tunggal. Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan dan tidak ada kemungkinan atau ditemukan tindak pidana lainnya yang bisa didakwakan terhadap terdakwa;
2. Dakwaan Alternatif. Kebalikan dari dakwaan tunggal, pada dakwaan alternatif adalah dakwaan disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif dan memiliki sifat mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Susunan surat dakwaan alternatif ini dipilih penuntut umum dimungkinkan oleh berbagai aspek yuridis yang melingkupi suatu tindak pidana dan bisa juga karena penuntut umum belum dapat menentukan kepastian tindak pidana yang mana yang paling tepat digunakan;
3. Dakwaan Subsidair. Bentuk surat dakwaan subsidair sepintas terlihat sama dengan surat dakwaan alternatif, dimana dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang

⁶ <https://www.boyyendratamin.com/2016/07/bentuk-surat-dakwaan-dan-ketentuan-kuhap.html> diunduh pada tanggal 8 Januari 2020.

diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah;

4. Dakwaan Kumulatif. Berbeda dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair, pada dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Bentuk dakwaan kumulatif biasa dipilih penuntut umum apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak pidana itu berdiri sendiri. Pada dakwaan kumulatif setiap dakwaan harus dibuktikan satu demi satu dan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan dimaksud; dan
5. Dakwaan Kombinasi. Dari namanya jelas, dakwaan kombinasi adalah surat dakwaan yang merupakan gabungan dari susunan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Dari bentuk dan susunan surat dakwaan sebagaimana dikemukakan di atas, satu hal yang yang tidak kalah penting adalah konsekuensi hukum yang menyertai sebuah surat dakwaan (setiap bentuk surat dakwaan) itu. Artinya, meskipun KUHAP memberikan kewenangan dan kebebasan pada Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, tetapi kewenangan Penuntut Umum itu diikuti suatu tuntutan profesional dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum oleh KUHAP tidak diperkenankan membuat surat dakwaan sekenanya, bahkan suatu surat dakwaan harus disusun dengan hati-hati, cermat, dan jelas.

Dalam perkara tindak pidana narkotika, Penuntut Umum sering hanya membuat dakwaan tunggal Pasal 111 dan Pasal 112 dalam perkara tindak pidana narkotika yang berkaitan, yang kadangkala berbeda dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang justru lebih mengarah kepada Pasal 127. Berikut bunyi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Pasal 111:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112,

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127,

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103; dan
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagai contoh kasus pertama, seorang tukang ojek, bernama Yasin, berumur 24 tahun, yang saat tertangkap tangan yang bersangkutan kedapatan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil di bawah 1 (satu) gram untuk jenis narkoba golongan I yakni ganja. Barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa menjadikan Penuntut Umum lebih mudah menerapkan Pasal 111 (bukan Pasal 127). Kasus yang semacam juga dialami oleh Hendra, berumur 25 tahun, yang juga tertangkap tangan karena kedapatan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil di bawah 1 (satu) gram untuk jenis narkoba golongan I yakni sabu. Penuntut Umum juga menerapkan Pasal 112 (bukan Pasal 127). Bentuk dakwaan tunggal ini dinilai tidak tepat karena penuntut umum tidak cermat dalam menentukan perbuatan hukum terdakwa yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan.

Apabila terdapat keragu-raguan untuk menentukan pasal mana yang harus dikenakan kepada terdakwa, seharusnya penuntut umum membuat bentuk dakwaan alternatif bukan dakwaan tunggal. Ketidaktepatan bentuk dakwaan dapat memberikan pilihan yang sulit bagi Hakim karena harus selalu mendasari kepada dakwaan.

Apabila rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam Pasal 111 atau Pasal 112), maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum

khusus dan maksimum khusus. Hal ini sangat dilematis apabila dihadapkan dengan tujuan Undang-undang itu sendiri yang juga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu karena harus dijatuhi pidana minimal 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk membuat skripsi yang berjudul **KETIDAKTEPATAN BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah hakim memutuskan perkara tindak pidana narkotika dengan dakwaan penuntut umum yang tidak tepat dengan KUHAP?
2. Apakah kendala bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika dengan bentuk dakwaan penuntut umum yang tidak tepat dengan KUHAP?
3. Tindakan apa yang harus dilakukan penuntut umum agar dapat membuat bentuk dakwaan yang tepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis hakim memutuskan perkara tindak pidana narkoba dengan terjadinya ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum yang tidak tepat dengan KUHAP;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis kendala yang terjadi bagi hakim yang memutuskan perkara dengan dakwaan yang tidak tepat dengan KUHAP; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis tindakan apa yang harus dilakukan penuntut umum agar dapat membuat bentuk dakwaan yang tepat.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Juga secara teoritis untuk mengungkapkan dan menganalisis peranan Kejaksaan dalam ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis dalam mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Juga masukan terhadap lembaga Legislatif untuk memberikan kejelasan tentang ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui jika ternyata hukum itu memiliki dasar, sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun juga menjadi tahu bagaimana asal muasal hukum yang ada itu dibentuk. NKRI memiliki dasar hukum yaitu pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berisi :

Pasal 1 ayat (1) Menyatakan :

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Pasal 1 ayat (3) menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) Pilar Kebangsaan, 4 (empat) Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari

berbagai macam gangguan. Begitu juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain.

Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan demikian lambang negara, beserta bendera negara, serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Memiliki 5 (Lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang mana berarti setiap warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan manusia secara adil dan beradab dimana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan hewan.

Jadi sila kedua ini menghendaki warga Negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa kita sebagai warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, prinsip dasar kekuasaan yudikatif dapat ditelaah dalam Undang-Undang Dasar 1945 :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku didalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa

tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :⁷

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁷ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :⁸

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”

Maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum* mengemukakan bahwa :⁹

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi

⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannyapun harus dibatasi.”

Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen Ke-4 juga mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan judul dalam skripsi ini yaitu mengenai bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana narkoba yang diatur dalam Pasal 28G yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; dan
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur bagaimana sebuah surat dakwaan disusun, termasuk bentuknya. Dalam kaitan ini KUHPA berdasarkan Pasal 14 huruf (d) hanya menyebutkan bahwa yang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Pembuatan Surat Dakwaan disebutkan beberapa bentuk dan susunan surat dakwaan yang pada pokoknya berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Satu hal yang yang tidak kalah penting adalah konsekuensi hukum yang menyertai sebuah surat dakwaan (setiap bentuk surat dakwaan) itu. Artinya, meskipun KUHAP memberikan kewenangan dan kebebasan pada Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, tetapi kewenangan Penuntut Umum itu diikuti suatu tuntutan profesional dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum oleh KUHAP tidak diperkenankan membuat surat dakwaan sekenanya, bahkan suatu surat dakwaan harus disusun dengan hati-hati, cermat, dan jelas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁰

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :¹¹

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang termasuk dalam metode pendekatan yuridis normatif.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 106.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
 - e) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan dengan judul. Wawancara yang dilakukan terhadap semua pihak, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai bahan penulisan hukum.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti

dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan perundang-undangan yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
 - 1) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jl. Cimuncang No.21D,
Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
40125.